**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 02**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

## 

## UMUM

### Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Dumai dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.
3. Laporan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

### Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi Laporan Realisasi Anggaran ini diterapkan dalam penyajian LRA yang disusun oleh SKPD/BLUD, PPKD, dan Pemda.
2. Kebijakan akuntansi Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) lebih hanya disajikan oleh entitas pelaporan (pemerintahan Kota Dumai).

### Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

1. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :
2. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
3. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
4. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
5. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
6. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
7. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Definisi

1. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
2. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. **Azas Bruto** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
4. **Basis Kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
5. **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
6. **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
7. **Entitas pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
8. **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
9. **Kebijakan akuntansi** adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
10. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
11. **Transfer** adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
12. **Pembiayaan (financing)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
13. **Perusahaan daerah** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
14. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. **Surplus/defisit** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
16. **SiLPA/SiKPA­** adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.
17. **Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

## STUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

1. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
3. nama SKPD/PPKD/Pemda;
4. periode yang dicakup;
5. mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan
6. satuan angka yang digunakan.
7. Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi mengenai perubahan gunggungan saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

### PERIODE PELAPORAN

1. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih disajikan sekali dalam setahun.

### TEPAT WAKTU

1. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.
2. Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran untuk diaudit BPK RI. Entitas akuntansi menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

### ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS DAN SALDO ANGGARAN LEBIH

1. Isi Laporan Realisasi Anggaran di tingkat entitas akuntansi (SKPD) berdasarkan dokumen anggaran SKPD (DPA-SKPD) terdiri dari pos-pos berikut:
   1. Pendapatan Asli Daerah;
   2. Belanja Tidak Langsung-Belanja Pegawai;
   3. Belanja Langsung, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal;
   4. Surplus/Defisit

Format Laporan Realisasi Anggaran di tingkat entitas akuntansi (SKPD) berdasarkan dokumen anggaran SKPD (DPA-SKPD) terlampir pada bagian akhir kebijakan ini.

1. Isi Laporan Realisasi Anggaran di tingkat entitas akuntansi (SKPD) berdasarkan klasifikasi SAP terdiri dari pos-pos berikut:
2. Pendapatan Asli Daerah;
3. Belanja Operasi;
4. Belanja Modal;
5. Surplus/Defisit

Format Laporan Realisasi Anggaran di tingkat entitas akuntansi (SKPD) berdasarkan klasifikasi SAP terlampir pada bagian akhir kebijakan ini.

1. Isi Laporan Realisasi Anggaran di tingkat entitas akuntansi PPKD berdasarkan dokumen anggaran PPKD (DPA-PPKD) terdiri dari pos-pos berikut:
2. Pendapatan Dana Perimbangan;
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
4. Belanja Tidak Langsung (selain Belanja Pegawai)
5. Surplus/Defisit
6. Penerimaan Pembiayaan;
7. Pengeluaran Pembiayaan;
8. Pembiayaan Neto;
9. SILPA

Format Laporan Realisasi Anggaran di tingkat entitas akuntansi (PPKD) berdasarkan dokumen anggaran SKPD (DPA-PPKD) terlampir pada bagian akhir kebijakan ini.

1. Isi Laporan Realisasi Anggaran di tingkat entitas akuntansi PPKD berdasarkan klasifikasi SAP terdiri dari pos-pos berikut:
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
4. Belanja Operasi;
5. Belanja Tak Terduga;
6. Transfer;
7. Surplus/Defisit;
8. Penerimaan Pembiayaan;
9. Pengeluaran Pembiayaan;
10. Pembiayaan Neto;
11. SILPA

Format Laporan Realisasi Anggaran di tingkat entitas akuntansi (PPKD) berdasarkan klasifikasi SAP terlampir pada bagian akhir kebijakan ini.

1. Isi Laporan Realisasi Anggaran di tingkat entitas pelaporan (Pemko Dumai) berdasarkan klasifikasi SAP terdiri dari pos-pos berikut:
2. Pendapatan Asli Daerah;
3. Pendapatan Transfer;
4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
5. Belanja Operasi;
6. Belanja Modal;
7. Belanja Tak Terduga;
8. Transfer;
9. Surplus/Defisit;
10. Penerimaan Pembiayaan;
11. Pengeluaran Pembiayaan;
12. Pembiayaan Neto;
13. SILPA.

Format Laporan Realisasi Anggaran di tingkat entitas pelaporan (Pemko Dumai) berdasarkan SAP terlampir pada bagian akhir kebijakan ini.

1. Pos, judul, dan sub jumlah lainnya dapat disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.
2. Isi Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumya pos-pos sebagai berikut:
3. Saldo Anggaran Lebih awal;
4. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
5. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
6. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya; dan
7. Lain-lain;
8. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Format Laporan Perubahan SAL di tingkat entitas pelaporan (Pemko Dumai) berdasarkan SAP terlampir pada bagian akhir kebijakan ini.

### INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan-LRA menurut kelompok dan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Pos pendapatan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan kelompok pendapatan sampai pada kode rekening jenis pendapatan, seperti: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
3. Entitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pada laporan entitas pelaporan, klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan
4. Klasifikasi pendapatan-LRA/belanja berdasarkan dokumen anggaran (Perda APBD/DPA) dapat berbeda dengan klasifikasi menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
5. Apabila terjadi perbedaan klasifikasi pendapatan-LRA/belanja berdasarkan dokumen anggaran (Perda APBD/DPA) dengan klasifikasi menurut SAP, maka LRA disusun melalui dua tahap, tahap pertama yaitu menyusun LRA format APBD dan selanjutnya dikonversi ke LRA format SAP.

### TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

1. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Contoh format LRA SKPD berdasarkan struktur dan isi dokumen pelaksanaan anggaran SKPD (DPA-SKPD) adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**SKPD.........**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir sd. 31 Desember 20x1 dan 20x0**

| **No.** | **Uraian** | **Anggaran**  **setelah Perubahan**  **20x1** | **Realisasi**  **20x1** | **Lebih (Kurang)** | **Realisasi**  **20x0** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4)-(3) | (6) |
| **1** | **PENDAPATAN** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Pendapatan Asli Daerah** |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD yg Sah | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah PAD** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **Jumlah Pendapatan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | **BELANJA** |  |  |  |  |
| **2.1** | **Belanja Tidak Langsung** |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Belanja Tidak Langsung** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **2.2.** | **Belanja Langsung** |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.2.3 | Belanja Modal | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Belanja Langsung** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **Jumlah Belanja** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Surplus (Defisit): [1]-[2]** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |

Contoh format LRA SKPD berdasarkan format SAP adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**SKPD.........**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir sd. 31 Desember 20x1 dan 20x0**

| **No.** | **Uraian** | **Anggaran**  **setelah Perubahan**  **20x1** | **Realisasi**  **20x1** | **Lebih (Kurang)** | **Realisasi**  **20x0** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4)-(3) | (6) |
| **1** | **PENDAPATAN** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Pendapatan Asli Daerah** |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD yg Sah | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah PAD** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **Jumlah Pendapatan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | **BELANJA** |  |  |  |  |
| **2.1** | **Belanja Operasi** |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Belanja Operasi** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **2.2.** | **Belanja Modal** |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Belanja Tanah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.2.6 | Belanja Aset Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Belanja Modal** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **Jumlah Belanja** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Surplus (Defisit): [1]-[2]** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |

**Format LRA PPKD**

Contoh format LRA PPKD berdasarkan struktur dan isi dokumen pelaksanaan anggran PPKD (DPA-PPKD) adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**PPKD**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir sd. 31 Desember 20x1 dan 20x0**

| **No.** | **Uraian** | **Anggaran**  **setelah Perubahan**  **20x1** | **Realisasi**  **20x1** | **Lebih (Kurang)** | **Realisasi**  **20x0** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4)-(3) | (6) |
| **1** | **PENDAPATAN** |  |  |  |  |
| **1.2** | **Pendapatan Dana Perimbangan** |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.2.2 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Umum | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.2.4 | Dana Alokasi Khusus | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **1.3** | **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah** |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.3.2 | Dana Darurat | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.3.3 | Dana Penyesuaian | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.3.4 | Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **Jumlah Pendapatan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | **BELANJA** |  |  |  |  |
| **2.2** | **Belanja Tidak Langsung** |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Bunga | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.2.2 | Subsidi | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.2.2 | Hibah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.2.4 | Bantuan Sosial | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.2.5 | Bagi Hasil | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.2.6 | Bantuan Keuangan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.2.7 | Belanja Tak Terduga | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Belanja Tidak Langsung** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Surplus /Defisit: [1]-[2]** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **PEMBIAYAAN** |  |  |  |  |
| **3.1.** | **Penerimaan Pembiayaan** |  |  |  |  |
| 3.1.1 | SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.1.5 | Penerimaan Piutang Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **3.2** | **Pengeluaran Pembiayaan** |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **Xxx** |
|  | **Pembiayaan Neto**  **[3.1] –[3.2]** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **Xxx** |
|  | **SILPA Tahun Anggaran Berkenaan [Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto]** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **Xxx** |

Contoh format LRA PPKD berdasarkan format SAP adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**PPKD**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**Untuk Tahun yang Berakhir sd. 31 Desember 20x1 dan 20x0**

| **No.** | **Uraian** | **Anggaran**  **setelah Perubahan**  **20x1** | **Realisasi**  **20x1** | **Lebih (Kurang)** | **Realisasi**  **20x0** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4)-(3) | (6) |
| **1** | **PENDAPATAN** |  |  |  |  |
| **1.2** | **Pendapatan Transfer** |  |  |  |  |
| **1.2.1** | **Transfer Pem Pusat-Dana Perimbangan** |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.2.1.3 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.2.1.4 | Dana Alokasi Umum | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.2.1.5 | Dana Alokasi Khusus | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **1.2.2** | **Transfer Pem Pusat-Lainnya** |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Dana Penyesuaian | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **Jumlah Pendapatan Transfer Pusat** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **1.2.4** | **Transfer dari Pemda Lainnya** |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | Transfer Bantuan Keuangan | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Transfer dari Pemda Lainnya** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **Jumlah Pendapatan Transfer** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **1.3** | **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah** |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.3.2 | Dana Darurat | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **Jumlah Pendapatan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **2** | **BELANJA** |  |  |  |  |
| **2.1** | **Belanja Operasi** |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Bunga | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.1.2 | Subsidi | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.1.3 | Hibah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.1.4 | Bantuan Sosial | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Belanja Operasi** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **2.2** | **Belanja Tak Terduga** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **2.3** | **Transfer ke Pemerintah Kabupaten/Kota** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 2.3.1 | Bagi Hasil ke Pemda Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.3.2 | Bantuan Keuangan | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Belanja** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Surplus /Defisit: [1]-[2]** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **PEMBIAYAAN** |  |  |  |  |
| **3.1.** | **Penerimaan Pembiayaan** |  |  |  |  |
| 3.1.1 | SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.1.5 | Penerimaan Piutang Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **3.2** | **Pengeluaran Pembiayaan** |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **Pembiayaan Neto**  **[3.1] –[3.2]** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **SILPA Tahun Anggaran Berkenaan [Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto]** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |

**Format Laporan Realisasi APBD (LRA Konsolidasian)**

Contoh format LRA di tingkat entitas pelaporan/pemda (LRA Konsolidasian) berdasarkan struktur dan isi Perda APBD adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**LAPORAN REALISASI APBD**

**Untuk Tahun yang Berakhir sd. 31 Desember 20x1 dan 20x0**

| **No.** | **Uraian** | **Anggaran**  **setelah Perubahan**  **20x1** | **Realisasi**  **20x1** | **Lebih (Kurang)** | **Realisasi**  **20x0** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4)-(3) | (6) |
| **1** | **PENDAPATAN** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Pendapatan Asli Daerah** |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipishakan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD yg Sah | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah PAD** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **1.2** | **Pendapatan Dana Perimbangan** |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.2.2 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Umum | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.2.4 | Dana Alokasi Khusus | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **1.3** | **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah** |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.3.2 | Dana Darurat | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.3.3 | Dana Penyesuaian | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.3.4 | Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **Jumlah Pendapatan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | **BELANJA** |  |  |  |  |
| **2.1** | **Belanja Tidak Langsung** |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.1.2 | Bunga | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.1.3 | Subsidi | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.1.4 | Hibah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.1.5 | Bantuan Sosial | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.1.6 | Bagi Hasil | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.1.7 | Bantuan Keuangan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.1.8 | Belanja Tak Terduga | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Belanja Tidak Langsung** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **2.2** | **Belanja Langsung** |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.2.3 | Belanja Modal | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Belanja Langsung** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **Jumlah Belanja** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Surplus /Defisit: [1]-[2]** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **PEMBIAYAAN** |  |  |  |  |
| **3.1.** | **Penerimaan Pembiayaan** |  |  |  |  |
| 3.1.1 | SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.1.5 | Penerimaan Piutang Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **3.2** | **Pengeluaran Pembiayaan** |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **Pembiayaan Neto**  **[3.1] –[3.2]** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **SILPA Tahun Anggaran Berkenaan [Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto]** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |

Contoh format LRA di tingkat entitas pelaporan/pemda (LRA Konsolidasian) berdasarkan format SAP adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**LAPORAN REALISASI APBD**

**Untuk Tahun yang Berakhir sd. 31 Desember 20x1 dan 20x0**

| **No.** | **Uraian** | **Anggaran**  **setelah Perubahan**  **20x1** | **Realisasi**  **20x1** | **Lebih (Kurang)** | **Realisasi**  **20x0** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4)-(3) | (6) |
| **1** | **PENDAPATAN** |  |  |  |  |
| **1.1** | **Pendapatan Asli Daerah** |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipishakan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD yg Sah | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah PAD** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **1.2** | **Pendapatan Transfer** |  |  |  |  |
| **1.2.1** | **Transfer Pem Pusat-Dana Perimbangan** |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.2.1.3 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.2.1.4 | Dana Alokasi Umum | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.2.1.5 | Dana Alokasi Khusus | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Pendaptan Transfer Dana Perimbangan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **1.2.2** | **Transfer Pem Pusat-Lainnya** |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Dana Penyesuaian | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **Jumlah Pendaptan Transfer Pem.Pusat** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **1.2.4** | **Transfer dari Pemda Lainnya** |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | Tranfer Bantuan Keuangan | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Transfer dari Pemda Lainnya** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **Jumlah Pendapatan Transfer** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **1.3** | **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah** |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.3.2 | Dana Darurat | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **Jumlah Pendapatan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | **BELANJA** |  |  |  |  |
| **2.1** | **Belanja Operasi** |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.1.2 | Belanja Barang | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.1.3 | Bunga | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.1.4 | Subsidi | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.1.5 | Hibah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.1.6 | Bantuan Sosial | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Belanja Operasi** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **2.2** | **Belanja Modal** |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Belanja Tanah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.2.6 | Belanja Aset Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Belanja Modal** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **2.3** | **Belanja Tak Terduga** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **2.4** | **Transfer ke Pemerintah Kabupaten/Kota** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 2.4.1 | Bagi Hasil ke Pemda Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2.4.2 | Bantuan Keuangan | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Belanja** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **Surplus /Defisit: [1]-[2]** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **PEMBIAYAAN** |  |  |  |  |
| **3.1.** | **Penerimaan Pembiayaan** |  |  |  |  |
| 3.1.1 | SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.1.5 | Penerimaan Piutang Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **3.2** | **Pengeluaran Pembiayaan** |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **Pembiayaan Neto**  **[3.1] –[3.2]** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  | **SILPA Tahun Anggaran Berkenaan [Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto]** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |

Contoh format Laporan Perubahan SAL

**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

**Per 31 Desember 20x1 dan 20x0**

**(dalam Rupiah)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **20x1** | **20x0** |
| 1 | Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal | xxx | xxx |
| 2 | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | (xxx) | (xxx) |
| 3 | Sub Total (1-2) | **xxx** | **xxx** |
| 4 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) akhir tahun berjalan | xxx | Xxx |
| 5 | Sub Total (3+4) | **xxx** | **xxx** |
| 6 | Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya | xxx | xxx |
| 7 | Lain-lain | xxx | xxx |
| 8 | Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir (5+6+7) | **xxx** | **xxx** |

